



PERLUASAN PERAN MILITER JEPANG DAN PERUBAHAN PERIMBANGAN KEKUATAN DI KAWASAN ASIA PASIFIK

Rizki Roza*)

Abstrak

Setelah melalui perdebatan panjang dan memicu protes besar, rancangan undang-undang untuk memperluas peran militer Jepang telah disetujui Majelis Tinggi. Peran militer Jepang yang lebih luas akan mempengaruhi perimbangan kekuatan di kawasan. Kekuatan-kekuatan utama di kawasan akan melakukan penyesuaian strategis untuk merespons perkembangan ini. Indonesia juga harus mengantisipasi perubahan perimbangan tersebut, dan mencari peluang untuk memperoleh keuntungan darinya.

Pendahuluan

Rancangan undang-undang yang diperjuangkan pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe terkait perluasan peran militer Jepang akhirnya mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi pada 19 September lalu. Setelah melewati perdebatan panjang dan memicu protes besar, voting yang dilakukan Majelis Tinggi menyatakan rancangan undang-undang tersebut disetujui, dengan 148 suara mendukung dan 90 suara menolak. Dominasi Partai Demokratik Liberal dan koalisinya Partai Komeito, serta dukungan beberapa partai kecil baik di majelis rendah maupun majelis tinggi menjadi faktor penentu keberhasilan Abe meloloskan undang-undang ini. UU tersebut berhasil lolos meskipun mendapat tentangan keras dari sebagian besar masyarakat Jepang sendiri, dan beberapa negara tetangga.

Terlepas dari perdebatan yang masih berlangsung di dalam negeri Jepang, perkembangan ini harus dicermati oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Perluasan peran militer Jepang akan berdampak langsung pada perimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Negara-negara besar di kawasan tentunya akan melakukan penyesuaian strategis terhadap perluasan peran militer Jepang. Bagaimana arah perubahan perimbangan kekuatan yang mungkin terjadi? Lalu bagaimana Indonesia harus merespons perubahan tersebut?

Perluasan Peran Militer Jepang

PM Shinzo Abe yang dikenal nasionalis telah sejak lama mengupayakan perluasan peran militer Jepang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Abe mengajukan rancangan

*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional, pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: rizki.roza@dpr.go.id



Undang-Undang yang merubah interpretasi terhadap konstitusi *Pacifist* Jepang. Sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, konstitusi tersebut hanya mengizinkan Jepang untuk memiliki kekuatan militer yang terbatas, hanya untuk memenuhi kebutuhan pertahanan, yang mereka sebut *Self-Defence Force/SDF* (pasukan bela diri).

Menurut pandangan Abe, pembatasan tersebut sudah tidak relevan di tengah kawasan Asia Pasifik yang terus bergejolak. Jepang tidak bisa lagi mengesampingkan stabilitas kawasan dan harus melangkah keluar dari naungan payung keamanan Amerika Serikat (AS). Melalui Buku Putih Pertahanan Jepang yang dirilis pada Agustus 2014 lalu, Abe mengklaim bahwa perubahan kebijakan memang dibutuhkan dalam rangka memastikan kemampuan Jepang untuk menghadapi tantangan-tantangan keamanan yang terus berkembang di kawasan, di antaranya kemajuan pesat kekuatan dan teknologi militer Tiongkok.

Upaya Abe untuk meloloskan RUU tersebut tidak hanya memicu perdebatan keras di parlemen, tetapi juga mendorong puluhan ribu warga turun ke jalan melakukan protes penolakan. Pengamat menilai RUU tersebut merupakan penghinaan terhadap konstitusi dasar yang cinta damai, dan berisiko mengubah arah Jepang yang selama ini dipandang sebagai negara damai dan demokratis. Abe dianggap telah menggunakan cara otoriter dalam mendorong pengesahan RUU tersebut. Sebagian warga Jepang menolak rencana tersebut karena dinilai melanggar konstitusi dan berpotensi menyeret Jepang dalam konflik yang melibatkan AS, misalnya membawa Tokyo terlibat dalam kampanye militer AS di Timur Tengah.

Dengan disetujuinya UU pertahanan tersebut akan mengubah posisi Jepang yang selama ini sebagai negara pasifis. Undang-Undang ini akan membawa perubahan terbesar bagi kekuatan pertahanan Jepang sejak Perang Dunia II. Jepang akan dimungkinkan untuk mengirim tentaranya ke luar negeri. UU tersebut akan merevisi larangan pertahanan kolektif atau membela negara sahabat yang menghadapi serangan. Disebutkan bahwa Jepang bisa membela sekutu dalam situasi di mana ada risiko jelas bahwa keberadaan Jepang terancam dan hak-hak rakyatnya terganggu lewat serangan terhadap negara yang memiliki hubungan

dekat dengan Jepang. Revisi tersebut juga meliputi penghilangan hambatan geografis pada dukungan logistik untuk pasukan dalam “situasi yang secara signifikan akan mempengaruhi keamanan Jepang”. Dimungkinkan pula SDF untuk berperan lebih aktif dalam operasi-operasi penjaga perdamaian di berbagai belahan dunia di bawah bendera PBB.

Perubahan Perimbangan Kekuatan di Kawasan

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, konstitusi Jepang menyatakan bahwa negara itu tidak boleh memiliki angkatan perang atau angkatan bersenjata, melainkan pasukan pertahanan yang terbatas. Namun pada kenyataannya, SDF merupakan kekuatan yang sangat signifikan di kawasan yang didukung sistem persenjataan yang mutakhir. Anggaran pertahanan Jepang menempati urutan ketujuh terbesar di dunia.

Perluasan peran militer Jepang akan memaksa kekuatan-kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik untuk melakukan perhitungan ulang terhadap kebijakan strategisnya agar mampu merespons munculnya kekuatan besar yang baru terlepas dari belenggunya. Tidak hanya kekuatan utama kawasan, seperti Tiongkok, AS, dan India yang akan melakukan penyesuaian, kekuatan yang lebih kecil di Asia Tenggara juga akan terpengaruh oleh dinamika ini.

Pertumbuhan kekuatan dan teknologi militer yang begitu pesat dan tidak transparan, serta perilaku asertif Tiongkok menjadi faktor yang sangat mempengaruhi arah kebijakan strategis kekuatan-kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik. Terdapat kesamaan pandangan di antara negara-negara di kawasan bahwa dibutuhkan kekuatan-kekuatan pengimbang untuk merespons kebangkitan Tiongkok.

Pada dekade lalu sebagian negara di kawasan, di antaranya Australia dan Filipina selalu mendorong AS untuk melakukan pengawasan yang ketat atas setiap perkembangan militer Jepang. Namun saat ini, kekuatan militer Jepang dianggap sebagai kekuatan strategis yang dibutuhkan untuk mengimbangi kebangkitan Tiongkok. Bagi Jepang sendiri, perluasan peran militer ini berarti Jepang akan menjalankan tanggungjawab lebih besar dalam kerangka pakta pertahanannya dengan AS.

Berdasarkan pakta pertahanan antara kedua negara, AS memiliki kewajiban untuk melindungi Jepang jika mereka berada dalam ancaman serangan negara lain. Dengan adanya perluasan peran militer, Jepang dapat berbuat sebaliknya. SDF dapat digelar di luar negara Jepang untuk mendukung AS dan negara sahabat lainnya. Hal ini juga diperlukan Jepang untuk meyakinkan AS bahwa Jepang merupakan sekutu penting yang mampu merespons tuntutan AS. Jepang akan memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi keamanan dan stabilitas internasional pada umumnya, dan menentukan arah arsitektur keamanan kawasan. Dan yang terutama dari perluasan peran militer ini adalah Jepang akan memiliki kekuatan tawar lebih besar dalam mengelola sengketa wilayahnya dengan Tiongkok.

Bagi AS, dikurangnya pembatasan terhadap peran militer Jepang akan mendorong persekutuan kedua negara menjadi semakin erat. Perluasan peran militer Jepang akan menghasilkan pembagian beban yang lebih seimbang dalam persekutuan kedua negara itu. Hal ini telah sejak lama menjadi tuntutan AS terhadap Jepang dan tidak mengalami penurunan meskipun Pemerintahan Obama menjalankan strategi *rebalancing* di kawasan Asia Pasifik.

Di tengah tekanan keterbatasan anggaran pertahanannya, bagi AS perubahan ini akan menempatkan Jepang sebagai negara yang miliki peran sentral dalam langkah *Pacific Pivot* AS. Keterbatasan anggaran pertahanan telah menyebabkan keraguan sebagian pihak atas kemampuan AS untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik. Namun, dengan adanya pengurangan beban tersebut akan mengokohkan upaya AS dalam menjaga stabilitas kawasan, bersama-sama Jepang dan negara berkepentingan lainnya dalam menghadapi Tiongkok. Perkembangan ini sangat mungkin akan diikuti pula dengan meningkatnya kembali dukungan Australia terhadap peran utama AS di kawasan, yang memang merupakan pendukung utama kebijakan *Pacific Pivot* AS.

Kekuatan utama lainnya yang harus diperhitungkan dalam perubahan perimbangan kekuatan ini adalah India. India dengan anggaran pertahanan yang berada pada peringkat delapan anggaran

pertahanan terbesar di dunia, dan telah berkomitmen menaikkan anggaran pertahanan sebesar 7,9 persen demi mempersempit kesenjangan militernya dengan Tiongkok dapat memberikan pengaruh cukup besar bagi kawasan. Tidak hanya karena memiliki kekuatan militer yang cukup signifikan, arah kebijakan luar negeri India, *Act East Policy*, juga searah dengan kebijakan AS dan Jepang dalam merespons meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Negara-negara di kawasan juga memandang India sebagai kekuatan potensial yang dapat menciptakan perimbangan kekuatan.

Bagi India, mengimbangi kekuatan dan mencegah dominasi Tiongkok di Laut China Selatan (LCS) merupakan upaya untuk menjamin akses India terhadap jalur-jalur pelayaran tertentu dan mencegah pemanfaat jalur tersebut oleh Tiongkok untuk mendominasi wilayah Samudera Hindia. Saat ini Tiongkok memfokuskan kekuatannya untuk mendominasi Laut Kuning, Selat Taiwan, LCS, dan Laut China Timur (LCT). Samudera Hindia masih merupakan prioritas keduanya. Memastikan Tiongkok tetap sibuk dengan prioritas pertamanya menjadi kepentingan India.

Dalam perkembangannya, sebagian pihak di kawasan Asia Timur dan Tenggara menghendaki India untuk memainkan peran strategis yang lebih aktif dalam mengimbangi Tiongkok. Ketimpangan kekuatan yang cukup besar dengan Tiongkok memaksa India untuk berhati-hati dalam mengelola hubungan. India tidak ingin dipandang sebagai sumber ancaman yang akhirnya akan memaksa Tiongkok menerapkan kebijakan yang bermusuhan secara terbuka terhadap India.

Proyeksi kekuatan Jepang yang lebih proaktif dan semakin kokohnya kekuatan AS di kawasan Asia Pasifik dapat menjadi momentum bagi India untuk terlibat lebih aktif di kawasan. Jika hal ini terjadi, maka perubahan perimbangan kekuatan di kawasan akan semakin signifikan. Dihadapkan pada perubahan tersebut, akan memaksa Tiongkok memperhitungkan kembali kebijakan-kebijakannya dalam mengelola berbagai isu keamanan di kawasan, termasuk sengketa di LCT dengan Jepang, sengketa di LCS dengan beberapa negara Asia, dan juga upayanya untuk

memperluas pengaruh di Samudera Hindia.

Selain itu, perlu juga menjadi perhitungan Tiongkok terkait kecenderungan kekuatan-kekuatan yang lebih kecil di kawasan. India dan Jepang memiliki kesamaan kebijakan terkait LCS, yaitu kedua negara menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aktor-aktor regional dalam menjamin kebebasan navigasi di kawasan, misalnya penguatan Vietnam dengan bantuan India, dan Filipina oleh Jepang. Jepang dan India akan dipandang sebagai sekutu potensial bagi kekuatan-kekuatan menengah yang juga penting dalam mengimbangi kekuatan Tiongkok.

Penutup

Perluasan peran militer Jepang akan menyebabkan perubahan perimbangan kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Dengan kekuatan militer yang lebih aktif, Jepang akan memiliki kekuatan tawar yang lebih besar dalam mengelola persoalan keamanan di kawasan. Pembagian beban yang lebih besar di antara Jepang dan AS dalam kerangka pakta pertahanannya juga akan mengokohkan pengaruh AS di kawasan. Sementara itu, India sebagai kekuatan besar lainnya di kawasan berpotensi untuk terlibat lebih aktif bersama-sama AS dan Jepang dalam mengimbangi kekuatan Tiongkok. Sedangkan Tiongkok, dihadapkan pada perubahan ini akan terpaksa memperhitungkan kembali posisinya dalam mengelola berbagai persoalan di kawasan.

Perkembangan ini penting untuk dicermati oleh Indonesia. Indonesia melalui Doktrin Poros Maritim telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kekuatan maritim dalam rangka turut menjaga keamanan dan keselamatan navigasi di jalur-jalur pelayaran internasional. Perubahan perimbangan kekuatan dapat melahirkan peluang bagi Indonesia. Komitmen negara-negara besar di kawasan untuk membantu peningkatan kapasitas kekuatan regional perlu dimanfaatkan oleh Indonesia. Parlemen dapat mempertimbangkan untuk meminta pemerintah meningkatkan kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam rangka peningkatan kekuatan maritim Indonesia.

Indonesia pada dasarnya sudah memiliki landasan kerja sama dengan kekuatan-kekuatan utama tersebut.

Misalnya dengan India, Deklarasi Kemitraan Strategis RI – India telah ditandatangani oleh kedua Kepala Negara pada tahun 2005 dengan salah satu prioritas di bidang pertahanan dan keamanan. Demikian pula dengan Tiongkok, Indonesian dan Tiongkok sejak 2005 telah mendeklarasikan kemitraan strategis, yang di dalamnya termasuk kerjasama maritim dan pertahanan. Menjadi penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang lahir dari perubahan perimbangan kekuatan tanpa merusak kemitraan strategis yang telah terbangun sebelumnya. Indonesia membangun kekuatan maritim tidak diarahkan untuk membendung kekuatan Tiongkok melainkan semata demi menjaga kedaulatan dan kekayaan maritimnya, serta sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan maritim.

Referensi

- "India's Act East Policy balancing China in the region: Thinktank", <http://indianexpress.com/article/india/india-others/indias-act-east-policy-balancing-china-in-the-region-thinktank/>, diakses tanggal 18 September 2015.
- "Kabinet Jepang setuju aturan baru ekspansi militer", http://www.antaraneews.com/berita/496198/kabinet-jepang-setujui-aturan-baru-ekspansi-militer?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news, diakses tanggal 18 September 2015.
- "Military Balance 2015 Press Statement", <https://www.iiss.org/en/about%20us/press%20room/press%20releases/press%20releases/archive/2015-4fe9/february-0592/military-balance-2015-press-statement-40a1>, diakses tanggal 18 September 2015.
- Rupakjyoti Borah, "Japan's Controversial Security Bill Pass in the Upper House. Now What?", <http://thediplomat.com/2015/09/japans-controversial-security-bills-pass-in-the-upper-house-now-what/>, diakses tanggal 18 September 2015.
- "UU Keamanan Direvisi, Militer Jepang kembali 'Agresif'?", <http://news.liputan6.com/read/2274599/uu-keamanan-direvisi-militer-jepang-kembali-agresif>, diakses tanggal 18 September 2015.